



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul	: RUU DKJ Segera Dibahas Pilkada Digelar, Guberur Dipilih
Tanggal	: Selasa, 05 Maret 2024
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 8

RUU DKJ Segera Dibahas

Pilkada Digelar, Gubernur Dipilih

SENAYAN tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) setelah Ibu Kota Negara dipindahkan ke IKN Nusantara di Kalimantan. Dipastikan, Pilkada DKI Jakarta tetap digelar. Pemimpin Jakarta tetap dipilih rakyat, bukan ditunjuk.

Kepastian itu disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Dia bilang, Pemerintah maupun partai politik mempunyai keinginan yang sama dalam pembahasan dalam UU DKJ ini.

"Bawa Gubernur Daerah Khusus Jakarta akan dipilih langsung seperti Pilkada di daerah lain," kata dia di Jakarta, Senin (4/3/2024).

Dasco menepis isu yang menyatakan adanya pemilihan gubernur melalui mekanisme lain. Itu hal keliru. Sebab, Pemerintah maupun partai politik memiliki keinginan yang sama untuk menggelar pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada November 2024.

Dasco menekankan, Pemerintah dan DPR telah sepakat dalam pembahasan RUU DKJ agar pemilihan gubernur akan dipilih langsung oleh rakyat. Kesepakatan itu telah dicapai sebelum masa reses.

Diketahui, DPR telah me-

ada pula pembahasan soal mekanisme pemilihan Gubernur DKJ. Menurutnya, penentuan mekanisme itu tergantung dinamika politik di lapangan.

"Belum ada pembahasan, ya tapi tergantung dinamika politik di lapangan, kalau fraksi-fraksi dan pemerintah sepakat bahwa Gubernur melalui pilkada, ya pilkada," kata Politisi PPP ini.

Selanjutnya, Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD menyebut, terdapat poin pada RUU DKJ mengecohkan. Dia meminta masyarakat hati-hati dalam mengawal pembahasan RUU DKJ.

"Ada satu isi yang di situ sangat mengcoh kalau saudara tidak hati-hati," ujar Mahfud, Jumat (1/3/2024).

Mahfud menjelaskan, isi rancangan aturan yang dimaksud salah, DPR nantinya memiliki dua nama yang akan menjadi calon Gubernur DKI Jakarta.

DPR selanjutnya menyerahkan kepada Presiden untuk menentukan satu nama yang akan menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta. Mekanisme pemilihan ini disiapkan setelah masyarakat menolak wacana sebelumnya, yakni Gubernur DKI Jakarta akan dipilih langsung oleh Presiden.

Diketahui, DPR telah menerima Surat Presiden (Surpres) tentang kelanjutan pembahasan RUU DKJ. Di sisi lain, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi mengaku belum menerima penugasan untuk membahas RUU itu.

"Sampai saat ini belum ada penugasan ke Baleg untuk membahas RUU DKJ. Kita tunggu saja rapat Badan Musyawarah (Bamus)," katanya, Senin (4/3/2024).

Baidowi mengatakan, belum

sung oleh Presiden.

Menurut Mahfud, mekanisme pemilihan tersebut justru dapat membuka keran terciptanya praktik kronisme.

Dengan demikian, Mahfud bilang, Presiden tetap akan cawe-cawe atau ikut campur dalam memilih Gubernur DKI Jakarta, sekalipun dengan menerapkan mekanisme yang diatur di dalam RUU DKJ.

Karena itu, Mahfud meminta supaya masyarakat dan partai politik besar tetap menolak RUU DKJ. ■KAL